

4. DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

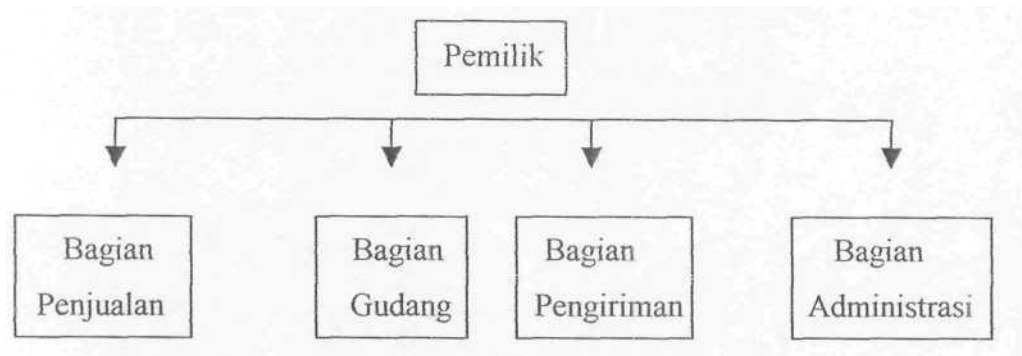
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Sejak tahun 1985, PT."X" melakukan *joint venture* dengan perusahaan ritel bertaraf nasional dan membentuk sebuah perusahaan dagang. Perusahaan Dagang itu pertama kali hanya dikenal sebagai Toko kecil tetapi sampai menjelang Tahun 1990, PT."X"dapat berkembang sangat pesat menjadi sebuah usaha dagang yang cukup besar dan dikenal, namun PT."X" ini tidak berniat untuk membuka toko-toko pada beberapa kota. PT."X" akan selalu memegang komitmen untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik dan menjamin bahwa toko yang ada merupakan tempat paling tepat yang menawarkan sesuatu yang sesuai dengan jumlah uang yang dibelanjakan oleh konsumen.

4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam suatu perusahaan, kelancaran usaha merupakan syarat utama untuk mencapai efektivitas dan produktivitas yang tinggi. Hal tersebut dapat dicapai apabila perusahaan memiliki struktur organisasi yang dapat menghubungkan antara atasan dan bawahan serta wewenang dan tanggungjawab yang dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Struktur organisasi yang baik harus fleksibel, sehingga memungkinkan untuk diadakan perubahan atau perbaikan dan dapat menunjang kesuksesan perusahaan tersebut. Bentuk struktur organisasi dari PT."X" adalah :

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT."X"



Struktur organisasi di PT."X" pada posisi puncak diduduki oleh *Pemilik*. Sebagai pimpinan tertinggi, Dibawah *Assistant Manager* ini ada 4 divisi yang masing-masing dikepalai oleh seorang Head Division, yang membawahi beberapa Karyawan atau Staf yang masuk dalam divisi masing-masing. Keempat divisi itu adalah *Bagian Penjualan*, *Bagian Gudang*, *Bagian Pengiriman* dan *Bagian Adminislrasi*.

ad.

1.Manajer

Manager dalam hal ini adalah pemilik sekaligus pengelola PT."X" karena struktur organisasinya sangat sederhana maka yang mengendalikan perusahaan dalam kegiatan operasional sehari-hari langsung ditangani oleh manajer sendiri.

Tugas dan wewenangnya:

- Merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi seluruh kegiatan-kegiatan perusahaan sehari-hari
- Mengawasi aktifitas yang dilakukan oleh masing-masing karyawannya
- Berhubungan langsung dengan produsen (pabrikan) untuk melakukan pembelian

2. Bagian Penjualan

Tugas dan tanggung jawabnya :

- Memasarkan produksi yang ada di perusahaan termasuk produk baru.
- Menciptakan pasar yang baru agar perusahaan dapat tetap eksis dan berkembang.
- Melakukan penagihan kepada konsumen yang sudah jatuh tempo.

3. Bagian Gudang

Tugas dan tanggung jawabnya :

- Melakukan pengawasan atau pengecekan terhadap penerimaan dan pengeluaran barang.
- Menyiapkan barang yang dipesan oleh konsumen.

4. Bagian Pengiriman

Tugas dan tanggung jawabnya adalah dalam hal pengiriman barang konsumen

5. Bagian Administrasi

Tugas dan wewenangnya:

- Melakukan pencatatan atas transaksi yang terjadi di dalam perusahaan
- Mempunyai wewenang untuk mengeluarkan uang kas untuk keperluan sehari-hari perusahaan dengan persetujuan dari pemilik
- Menyusun laporan keuangan dan laporan perhitungan pajak perusahaan
- Bertanggung jawab kepada pemilik atas hasil laporan tersebut diatas sebagai informasi perusahaan

4.1.3 Ketenagakerjaan

Jumlah pegawai atau karyawan PT."X" adalah sekitar 10 orang, mengambil Kebijakan dengan menggunakan sistem penggajian bulanan. Jam kerja yang berlaku adalah sebagai berikut:

- *Bagian Kanior*

Jam kerja : pk. 08.00 - 16.30

Jam Istirahat : pk. 13.00 - 14.00

- *Bagian Kasir*

Jamkerja : pk. 08.30-17.30

Jam Istirahat : pk. 13.00 - 14.00

- *Bagian Toko*

Jam kerja : pk. 08.00 - 17.30

Jam istirahat : pk. 13.00 - 14.00

4.1.4 Tujuan Perusahaan

Setiap perusahaan, baik itu perusahaan yang baru berdiri maupun yang telah berdiri tentu mempunyai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tujuan perusahaan merupakan hasil akhir dan titik akhir atau segala sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan cara mengarahkan usaha-usaha atau tujuan dimasa sekarang.

Untuk mencapai tujuan perusahaan harus menentukan langkah-langkah yang tepat dan teratur agar terdapat kesatuan tindakan. Oleh karena itu tujuan perusahaan dibagi menjadi 2, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek adalah tujuan yang harus dicapai dalam jangka waktu yang relative singkat, dan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai perusahaan adalah :

1. Mencapai target penjualan yang telah ditentukan sebelumnya
2. Dapat mempertahankan popendekatan perusahaan dalam persaingan
3. Memenuhi keinginan serta kebutuhan pelanggan dengan perbedaan strategi serta peningkatan pelayanan
4. Memaksimalkan laba perusahaan.

Tujuan jangka panjang merupakan kelanjutan dari tujuan jangka pendek perusahaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Tujuan jangka panjang yang harus dicapai perusahaan adalah :

1. Mengadakan perluasan usaha yang lebih baik
2. Meningkatkan kesejahteraan karyawan yang ada dalam perusahaan
3. Berusaha memaksimalkan laba, sehingga perusahaan dapat melakukan perluasan pasar dan mempertahankan popendekatan perusahaan yang terbaik.

4.1.5 Kebijakan akuntansi Perusahaan

1. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun dan disiapkan pada setiap akhir tahun untuk mengetahui popendekatan keuangan perusahaan yang tersedia dalam neraca serta mengetahui kinerja perusahaan yang tersedia dalam laporan laba rugi.

2. Penghasilan

Sumber penghasilan perusahaan berasal dari penjualan barang hasil pabrikan secara eceran. Hasil dari penjualan ini dimasukkan sebagai penghasilan. Hasil penjualan tersebut dapat dimasukkan penghasilan karena menurut Standar akuntansi Keuangan yang berlaku, penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi.

3. Persediaan

Dalam menilai persediaan barang, PT."X" menggunakan metode penilaian persediaan rata-rata (average). Sedangkan sistem pencatatan persediaan barang yang digunakan oleh PT."X" adalah sistem periodic. Namun diawal Tahun 2003, PT."X" telah melakukan perombakan terhadap metode penilaian persediaan rata-rata (average) menjadi metode penilaian persediaan FIFO.

4. Aktiva Tetap

Aktiva Tetap disusutkan berdasarkan harga perolehan. Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus (Straight line) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap.

5. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Penjualan diakui pada saat penyerahan barang yang diikuti dengan pembayaran atas penyerahan barang tersebut. Sedangkan beban akan diakui pada saat beban itu teijadi misalnya gaji karyawan dicatat sebagai beban pada saat karyawan tersebut bekerja.

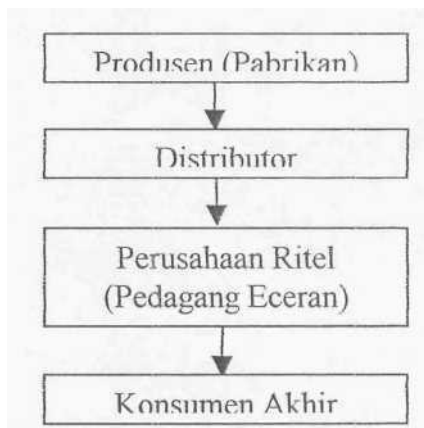
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Gambaran Aktivitas Perusahaan

PT."X" merupakan perusahaan ritel yang selalu tumbuh dengan pesat, dinamis dalam melakukan ekspansi dan senantiasa menjaga kualitas serta efisiensi dalam operasionalnya. Sebagai perusahaan ritel, PT."X" melakukan aktifitas penjualan secara langsung terhadap barang-barang hasil pabrikan kepada pihak konsumen. Berikut ini adalah keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh PT."X" :

1. Pembelian barang
2. Transportasi barang
3. Penyimpanan barang
4. Penentuan harga jual
5. Display barang
6. Menyediakan informasi barang
7. Menjual barang
8. Melayani konsumen

Gambar 4.2. Gambaran Aktivitas Usaha PT. "X"



Sumber: Dokumen Perusahaan

4.2.2 Prosedur Pembelian

PT. "X" merupakan perusahaan ritel yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PT."X" biasanya melakukan pembelian dengan pemasok berdasarkan sistem *order* atau pesanan. Sebagian besar pembelian itu dilakukan secara kredit dengan masa pembayaran kurang lebih selama 1(satu) bulan. Namun tidak menutup kemungkinan bagi pihak perusahaan untuk melakukan transaksi pembelian secara tunai (cash). Transaksi pembelian yang dilakukan oleh perusahaan berasal dari pemasok yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Di samping itu sebagian kecil dari pembelian itu ternyata berasal dari pemasok yang belum menjadi Pengusaha Kena Pajak, sehingga pihak pemasok tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai.

Di dalam transaksi pembelian itu, PT."X" dapat memperoleh potongan pembelian dengan syarat tertentu. Misalnya. Perusahaan baru akan mendapat potongan pembelian jika dapat melakukan pembayaran dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak barang dagangan itu dibeli. Selain itu, perusahaan juga mendapatkan kesempatan untuk mengembalikan barang yang cacat atau rusak kepada pemasok dalam batas maksimum 1 (satu) bulan. Dengan demikian perusahaan dapat mengakui adanya transaksi retur pembelian.

Barang dagangan yang sudah diterima dari pihak pemasok akan dimasukkan ke gudang dan dilakukan pemeriksaan secara fisik. Bila dalam pemeriksaan itu terdapat barang yang tidak sesuai dengan permintaan atau cacat, maka perusahaan dapat mengembalikan barang dagangan tersebut kepada pemasok. Sedangkan untuk barang dagangan yang diterima sesuai dengan permintaan perusahaan akan langsung di data ke dalam komputer.

TabeH.1.

Data Pembelian yang Berasal dari Non Pengusaha
Kena Pajak (PKP) Selama Tahun 2002 (dalam rupiah)

Kelompok Pembelian	Total Tahun 2002
Alat-alat tulis kantor	315,085,073.05
Foto copy	35,779,034.42
Cetakan	22,688,787.02
Alat-alat percetakan	12,857,900.08
Total	386,410,794.50

Sumber: dokumen perusahaan

Disamping perusahaan melakukan pembelian dari Pengusaha Kena Pajak (PKP), perusahaan juga mengadakan transaksi pembelian dengan pemasok yang bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak (Non PKP). Dalam hal pembelian, Perusahaan lebih banyak melakukan transaksi tersebut dengan pemasok yang merupakan Pengusaha Kena Pajak. Data Pembelian yang berasal dari Non Pengusaha Kena Pajak (Non PKP) yang dilakukan oleh PT."X" selama tahun 2002 tampak pada tabel 4.1.

4.2.3 Prosedur Penjualan

f

Barang dagangan yang sesuai dengan permintaan perusahaan dan telah didata dalam komputer tersebut, nantinya siap untuk dikirim ke dalam pos-pos tertentu sesuai dengan pesanan masing-masing. Dengan demikian barang dagangan dapat dijual secara langsung kepada konsumen tanpa adanya pihak perantara. Dalam hal ini proses penjualan terjadi ketika pihak konsumen datang ke toko dan membeli barang dagangan serta kemudian langsung melakukan pembayaran pada saat itu juga. Dengan kata lain, transaksi penjualan oleh PT."X" terjadi secara tunai (*cash*), sehingga Perusahaan tidak mengakui adanya piutang usaha. Dalam transaksi penjualan kepada konsumen akhir, pihak Perusahaan dapat memberikan potongan penjualan untuk jenis barang tertentu. Potongan penjualan tersebut nantinya akan mengurangi jumlah pembayaran yang dibayarkan oleh konsumen kepada pihak Perusahaan.

Dalam hal terjadinya retur penjualan, pihak Perusahaan tidak bersedia menerima pengembalian barang dagangan yang sudah dibeli. Dengan demikian apabila terdapat barang dagangan yang tidak sesuai dengan permintaan konsumen atau barang itu rusak maupun cacat, maka pihak Perusahaan tidak menerima pengembalian barang tersebut.

Tabel 4.2.

Data Penjualan Selama Tahun 2002 (dalam rupiah)

I Kelompok Penjualan	Total Tahun 2002
Alat-alat tulis kantor	3,455,167,180.55
Foto Copy	985,190,090.40
Cetakan	375,087,572.02
Alat-alat percetakan	170,215,707.60
¹ Total	4,985,660,550.00

Sumber: dokumen perusahaan

4.2.4 Akuntansi Pajak Penghasilan Nilai PT "X"

a. Transaksi Pembelian Barang Dagang dari Pengusaha Kena Pajak :

Sebagai perusahaan ritel, transaksi pembelian yang dilakukan oleh PT."X" dapat berasal dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Bukan Pengusaha Kena Pajak (Non PKP). Saat perusahaan melakukan pembelian barang dagang yang merupakan Barang Kena Pajak dari PKP, maka perusahaan akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai oleh Pemasok yang lebih dikenal dengan istilah PPN Masukan. Perusahaan juga harus meminta Faktur Pajak kepada pemasok- yang dapat digunakan sebagai bukti pungutan PPN dan sebagai sarana untuk mengkreditkan PPN Masukan.

PPN Masukan yang timbul atas pembelian Barang Kena Pajak (BKP) yang berasal dari PKP, dapat dikreditkan pada akhir masa pajak. Untuk pencatatan dalam pembukuan perusahaan atas pembelian BKP, perusahaan menggunakan metode persediaan periodik. Dengan demikian pembelian BKP dicatat dengan mendebet rekening pembelian.

Jurnal untuk transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Pembelian	Rp.386.410.734,50	
PPNMasukan	Rp. 38.641.073,40	
Hutang		Rp. 425.051.873,90

b. Transaksi Pembelian Barang Dagang dari Non Pengusaha Kena Pajak (Non PKP):

Apabila pembelian barang dagang yang dilakukan oleh PT."X" berasal dari pabrikan atau pemasok yang bukan merupakan PKP, maka perusahaan tidak akan dipungut PPN Masukan. PPN Masukan atas BKP yang dibeli dari pabrikan atau pemasok yang bukan merupakan PKP akan bernilai nihil. Sehingga PPN Masukan tersebut juga tidak dapat dikreditkan dalam penghitungan PPN terutang pada akhir masa pajak. Jurnal yang dibuat untuk transaksi diatas adalah :

Pembelian	Rp. 386.410.734,50	
Hutang		Rp. 386.410.734,50

c. Transaksi Retur Pembelian :

Apabila barang yang telah dibeli cacat atau tidak sesuai dengan pesanan, maka perusahaan akan mengembalikan kepada pemasok. Dalam hal ini perusahaan tidak pernah melakukan pengembalian BKP jadi tidak terdapat jurnal retur pembelian.

d. Transaksi Penjualan Barang Dagang :

Dalam hal penjualan Barang dagang, perusahaan tidak membutuhkan pihak perantara untuk menyalurkan barang dagang ke konsumen. Perusahaan dapat secara langsung melakukan penyerahan atas penjualan kepada konsumen, dapat dilakukan sekaligus pada saat konsumen melakukan pembelian barang. Jurnal atas transaksi tersebut adalah:

Piutang	Rp. 5.484.226.612,70	
Penjualan		Rp. 4.985.660.557,00
PPN Keluaran		Rp. 498.566.055,70

e. Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Terutang:

Oleh karena menerapkan tarif umum PPN 10%, maka besarnya PPN terutang yang harus dibayar dan disetor ke kas negara adalah selisih antara PPN Keluaran dan PPN Masukan. Jumlah PPN Keluaran diperoleh dari 10% atas transaksi penjualan kepada konsumen. Sedangkan jumlah PPN Masukan diperoleh dari 10% atas transaksi pembelian yang berasal dari PKP. Jurnal yang dibuat untuk transaksi diatas adalah :

PPN Keluaran	Rp. 498.566.052,70	
Kas		Rp. 459.924.979,30
PPN Masukan		Rp. 38.641.073,40

4.2.5 Laporan Keuangan

PT."X" menyusun laporan keuangan dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan tujuan agar mudah di pahami dan dibaca oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengukur kinerja. Perusahaan menyiapkan dan menyusun laporan keuangan pada setiap akhir tahun, penyusunan neraca dimaksudkan untuk mengetahui popendekatan aktiva, kewajiban, serta modal pada waktu tertentu. Sedangkan laporan laba rugi disusun untuk mengetahui besarnya laba atau rugi yang terjadi selama periode tertentu.

Tabel 4.3. Laporan Laba / Rugi PT."X" Selama Tahun 2002

PT."X"		
LAPORAN RUGI / LABA		
PER 31 DESEMBER 2002		
(dalam Rupiah)		
Penjualan Ritel (Exlude PPN)		4,985,660,557.00
HARGA POKOK PENJUALAN :		
Stok Awal		572,445,409.00
Pembelian Barang	2,526,549,838.50	
Retur Pembelian	=====	
		<u>2,526,549,838.50</u>
Stok barang yang tersedia		3,098,995,247.50
Stok Akhir		<u>404,391,626.00</u>
		-2,694,603,621.50
Laba Kotor		2,291,056.936.50
BIAYA USAHA		
BIAYA TOKO		
Biaya Gaji	385,000,000.00	
Biaya Sewa	<u>235,443,300.00</u>	
		620,443,300.00
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI		
Biaya Listrik	85,365,439.00	
Biaya Telephon/Fax	50,288,000.00	
Biaya Retribusi Pasar/sampah	2,500,000.00	
Biaya Rekening Air/PDAM	3,750,000.00	
Biaya Ekspedisi Barang	40,850,500.00	
Biaya Perlengkapan Kantor	15,366,800.00	
Biaya Penyusutan	30,640,834.00	
Biaya Perawatan dan Pemeliharaan	30,837,600.00	
Biaya Pengepakan	25,701,250.00	
Biaya Bunga	15,000,000.00	
Biaya Lain-Lain	<u>7,500,000.00</u>	
		307,800,423.00
Total Biaya Usaha		<u>928,243.723.00</u>
Laba Bersih		<u>1,362,813.213.50</u>

Tabel 4.4 Neraca
PT."X" Tahun 2002

PT."X"
NERACA
PER 31 DESEMBER 2002

AKTIVA		HUTANG DAN MODAL	
AKTIVA LANCAR		HUTANG	
Kas	82,578,745.00	Hutang Dagang	165,347,595.00
Biaya Dibayar Dimuka	18,513,750.00	Hutang Bank	115,794,600.00
Stok Barang	404,391,626.00	Hutang Pajak	49,348,348.00
Jumlah Aktiva Lancar	505,484,121.00	Jumlah Hutang	330,490,543.00
AKTIVA TETAP		MODAL	
Bangunan	210,728,890.00	Modal	185,100,614.00
Kendaraan	150,916,725.00	Laba Ditahan	225,800,000.00
Peralatan	80,401,400.00	Laba Bersih	103,702,793.00
Inventaris	58,126,150.00		
Akumulasi Penyusutan	-160,563,336.00		
Jumlah Aktiva Tetap	339,609,829.00	Jumlah Modal	514,603,407.00
TOTAL AKTIVA	845,093,950.00	TOTAL HUTANG DAN MODAL	845,093,950.00

4.3 Analisis dan Perabahasan

Menurut Keputusan Menten Keuangan No.567/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP), perusahaan ritel dapat memilih metode perhitungan PPN yang dianggap paling sesuai untuk diterapkan di perusahaannya. Demikian juga PT."X" dapat memilih salah satu metode perhitungan PPN yang paling sesuai dengan kondisi perusahaan. Pada sub bab ini akan dilakukan analisa pembahasan untuk menentukan pilihan yang paling menguntungkan bagi PT."X", yaitu antara metode tarif PPN 10% dan metode tarif PPN 2% untuk pedagang eceran. Pembahasan ini akan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

4.3.1. PT."X" Sebagai Pengusaha Kena Pajak

PT."X" merupakan perusahaan ritel yang membeli barang dalam jumlah yang besar dan menjualnya secara langsung kepada konsumen melalui sebuah toko. Dengan melihat usaha yang dilakukan, sudah jelas bahwa PT."X" merupakan Pengusaha Kena Pajak. Hal ini karena barang-barang yang diperdagangkan PT."X" semuanya merupakan Barang Kena Pajak (BKP). Di samping itu, penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean dan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha.

Dari data yang diperoleh di atas, khususnya dari omset penjualan dapat diketahui bahwa jumlahnya sangat besar atau sudah melebihi batasan pengusaha kecil, yaitu melebihi Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun buku. Dengan demikian PT."X" wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai atas barang dagangan yang dijual oleh PT."X" tersebut. Begitu pula dalam hal perhitungan Pajak Penghasilan-nya tidak dapat memilih menggunakan Nortna Perhitungan Penghasilan Neto, karena jumlah peredaran bruto selam 1 (satu) tahun buku sudah melebihi Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

4.3.2. Perbandingan Antara Metode Perhitungan PPN menggunakan Tarif 10% dengan Tarif 2%

Berikut ini disajikan pembahasan mengenai metode perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menggunakan mekanisme Pengkreditan PPN Masukan dengan PPN Keluaran (Tarif Umum 10%) yang diterapkan oleh PT."X" dibandingkan dengan bila menerapkan metode perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (Tarif 2%). Perbandingan kedua metode perhitungan PPN akan ditinjau dan 3 pendekatan, yaitu pendekatan pembayaran PPN terutang ke kas negara, pendekatan laporan laba rugi, dan pendekatan pengeluaran kas untuk pembayaran pajak.

4.3.2.1 Perbandingan Kedua Metode ditinjau dari Pendekatan Pembayaran PPN Terutang ke Kas Negara

Sebelum menentukan metode perhitungan PPN yang paling tepat bagi PT."X", maka perusahaan perlu untuk membandingkan kedua metode tersebut dari pendekatan pembayaran PPN terutang ke kas negara. Berdasarkan data-data yang diperoleh, dapat dilakukan perhitungan mengenai besarnya PPN terutang dan sekaligus pencatatan transaksi menurut tarif 10% dan Tarif 2%.

A. Prosedur Pencatatan Transaksi (*Jurnal Entry*) Berdasarkan Perhitungan PPN yang menggunakan mekanisme pengkreditan PPN Masukan dengan PPN Keluaran (Tarif 10%).

PT."X" dalam penghitungan PPN yang terutang menggunakan mekanisme PPN Keluaran dan PPN Masukan, sehingga tarif PPN yang digunakan oleh Perusahaan adalah Tarif 10%. Melalui data pembelian dan data penjualan yang telah diperoleh, maka dapat dihitung besarnya jumlah PPN Masukan dan PPN Keluaran. Dengan Demikian berdasarkan mekanisme pengkreditan PPN Masukan dan PPN Keluaran (Tarif 10%), juga dapat diketahui besarnya jumlah PPN Terutang yang harus disetor ke Kas Negara.

Selama tahun 2002, PT."X" melakukan pembelian yang berasal dari PKP sebesar Rp. 2.526.549.838,50. Dari jumlah tersebut perusahaan dapat menjual barang dagangannya sejumlah Rp. 4.499.404.794.00. Sedangkan pembelian yang berasal dari Non PKP adalah Rp. 386.410.794,50. Dari jumlah pembelian itu perusahaan mampu menghasilkan penjualan sebesar Rp. 486.255.763,30. Dengan demikian diperoleh total pembelian dan total penjualan selama tahun 2002 sebesar Rp. 2.523.549.837,50 dan Rp. 4.985.660.557,30. Perhitungan PPN dengan Tarif 10% dengan menggunakan pembelian dari PKP dan Non PKP, dapat dijelaskan seperti pada tabel 4.5 dan tabel 4.6.

Tabel 4.5. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan Tarif 10% Berdasarkan Data Pembelian Pengusaha Kena Pajak (PKP)
(dalam Rupiah)

Kategori Penjualan	Total Selama Tahun 2002				
	Penjualan (a)	Pembelian (b)	PPN Masukan (c) = 10% x (b)	PPN Keluaran (d) = 10% x (a)	PPN Terutang (e) = (d) - (c)
Alat-alat tulis Kantor	3,537,085,073.05	1,650,167,181.55	165,016,718.16	353,708,507.31	188,621,789.15
Foto Copy	440,779,034.42	235,190,090.40	23,519,009.04	44,077,903.44	20,558,894.40
Cetakan	340,688,787.02	176,087,572.02	17,608,757.20	94,068,878.70	76,460,121.10
Alat-alat percetakan	130,851,900.08	78,694,200.05	7,869,420.05	13,085,190.02	5,215,769.97
Total	4,499,404,794.00	2,140,139,043.00	214,013,904.50	449,940,479.40	235,926,574.90

Sumber: Dokumen Perusahaan.

Tabel 4.6. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan Tarif 10% Berdasarkan Data Pembelian Non Pengusaha Kena Pajak (Non PKP)
(dalam Rupiah)

Kategori Penjualan	Total Selama Tahun 2002				
	Penjualan (a)	Pembelian (b)	PPN Masukan (c)	PPN Keluaran (d) = 10% x (a)	PPN Terutang (e) = (d) - (c)
Alat-alat tulis Kantor	320,276,346.40	315,085,073.05		32,027,634.64	32,027,634.64
Foto Copy	50,384,802.70	35,779,034.42		5,538,480.27	5,538,480.27
Cetakan	95,542,316.64	22,688,787.02		9,554,231.67	9,554,231.66
Alat-alat percetakan	20,052,297.59	12,857,900.08		2,005,229.76	2,005,229.76
Total	486,255,763.30	386,410,794.50	-	48,625,576.33	48,625,576.33

Sumber: Dokumen Perusahaan.

Berdasarkan tabel 4.5 dan tabel 4.6 dapat dilakukan pembahasan perhitungan PPN Terutang menurut tarif 10% sebagai berikut:

PPN Keluaran :

a. Penjualan atas BKP yang dibeli dari PKP

$$= 10\% \times \text{Rp. } 4.499.404.794,00 = \text{Rp. } 449.940.479,40$$

b. Penjualan atas BKP yang dibeli dari Non PKP

$$= 10\% \times \text{Rp. } .486.255.763,30 = \underline{\text{Rp. } 48.625.576,33}$$

$$\text{Total PPN Keluaran} = \text{Rp. } 498.566.055,73$$

PPN Masukan :

a. Pembelian dari Non PKP = Rp. —

b. Pembelian dari PKP

$$10\% \times \text{Rp. } 2.140.139.043,00 = \underline{\text{Rp. } 214.013.904,30}$$

$$\text{Total PPN Masukan} = \underline{\text{(Rp. } 214.013.904,30)}$$

$$\text{PPN yang masih harus dibayar} = \text{Rp. } 284.552.151,43$$

Dari perhitungan diatas terlihat bahwa jumlah PPN yang masih harus disetor ke kas negara berdasarkan tarif 10% adalah sebesar Rp. 284.552.151,43. berdasarkan perhitungan diatas, jurnal yang dapat dibuat untuk mencatat transaksi yang terjadi di perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Transaksi pembelian Barang Kena Pajak dari PKP

Pembelian Rp. 2.140.139.043,00

PPN Masukan Rp. 214.013.904,30

Hutang Rp. 2.354.152.947,30

2. Transaksi pembelian Barang Kena Pajak dari Non PKP

Pembelian Rp. 386.410.734,50

Hutang Rp. 386.410.734,50

3. Transaksi Penjualan Barang Kena Pajak

Ketika perusahaan menggunakan tarif 2 %. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut ke konsumen saat terjadinya penjualan barang 10%. Hal ini sesuai dengan

Surat Edaran No. 06/Pj.52/1995. Perhitungan besarnya PPN yang dipungut ke konsumen adalah sebagai berikut:

Penjualan Barang = Rp. 4.985.660.557,00

PPN Keluaran:

10% x Rp. 4.985.660.557,00 - Rp. 498.566.055,70

Jurnal atas transaksi diatas adalah :

Piutang	Rp. 5.484.226.613,70
Penjualan	Rp. 4.985.660.557,00
PPN Keluaran	Rp. 498.566.055,70

4. Transaksi pembayaran PPN Terutang

Saat perusahaan menerapkan metode perhitungan PPN dengan tarif 2 %, perusahaan tidak dapat mengkreditkan PPN Masukan yang sudah dibayar. Dalam perhitungan PPN terutang, kas yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2 % dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dalam hal ini DPP-nya adalah harga jual barang dagangan, yaitu sebesar Rp. 4.985.660.557,00. Sehingga Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar ke Kas Negara oleh Perusahaan adalah :

= 2% x DPP

= 2% x Rp. 4.985.660.557,00

= Rp. 99.713.211,14

Jurnal dari transaksi diatas adalah :

PPN Keluaran	Rp. 99.713.211,14
Kas	Rp. 99.713.211,14

5. Jurnal untuk mencatat Net-off PPN Keluaran dengan PPN Masukan

Sesuai dengan ketentuan perpajakan ketika perusahaan menerapkan tarif 2 %, perusahaan harus membayar PPN terutang ke kas negara sebesar 2% dari total penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). Namun perusahaan tetap dapat memungut PPN sebesar 10 % dari total penyerahan BKP kepada konsumen. Dengan demikian

terdapat selisih PPN Keluaran antara yang diterima dari konsumen dengan PPN yang dibayar ke Kas Negara sebesar 8 % (delapan persen). Perhitungannya adalah sebagai berikut:

* PPN Keluaran yang dipungut:

$$= 10\% \times \text{Rp. } 4.985.660.557,00 = \text{Rp. } 498.566.057,70$$

* PPN Keluaran yang dibayar ke Kas Negara

$$= 2\% \times \text{Rp. } 4.985.660.557,00 = \underline{\text{Rp. } 99.713.211,14}$$

* Selisih PPN Keluaran

$$= 8\% \times \text{Rp. } 4.985.660.557,00 = \text{Rp. } 398.852.844,56$$

Berdasarkan ketentuan mengenai Mekanisme Pengkreditan PPN dalam Bab 1 Pasal 9 PP No. 143 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 mengenai Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, maka selisih PPN sebesar 8% tersebut akan dibebankan sebagai pengurang atau penambah unsur Harga Pokok Penjualan setelah memperhitungkan PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

Perlu diketahui bahwa sebagian barang dagang yang dibeli oleh perusahaan adalah barang dagang dari pemasok yang teraiaasuk kategori Pengusaha Kecil sehingga pemasok tersebut tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian PPN Masukan dari pembelian yang berasal dari bukan Pengusaha Kena Pajak lebih kecil dibandingkan dengan PPN Masukan dari pembelian yang berasal dari Pengusaha Kena pajak, yaitu sebesar Rp. 2.140.139.043,00. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Selisih PPN Keluaran} \qquad \qquad \qquad \text{Rp. } 398.852.844,56$$

PPN Masukan aktual:

a. untuk pembeJian dari

$$\text{Non PKP} \qquad \qquad \qquad \text{Rp. —}$$

b. untuk pembelian dari

$$\text{PK?} \qquad \qquad \qquad \underline{\text{Rp. } 214.013.904.30}$$

$$\text{Total PPN Masukan aktual} \qquad \qquad \qquad \underline{(\text{Rp. } 214.013.904.30)}$$

$$\text{Harga Pokok Penjualan (Pajak Yang dipungut)} \qquad \qquad \qquad \text{Rp. } 184.838\ 940.26$$

Jurnal yang dibuat untuk mencatat net-off PPN Keluaran dengan PPN Masukan adalah sebagai berikut:

PPN yang masih harus dibayar	Rp. 398.852.844,56
PPN Masukan	Rp. 214.013.904,30
Harga Pokok Penjualan	Rp. 184.838.940,26

Perlu diketahui bahwa jurnal diatas tidak akan dijumpai pada perusahaan yang menggunakan metode perhitungan PPN dengan tarif 10%.

Untuk lebih memperjelas perbandingan prosedur pencatatan transaksi (*jurnal entry*) antara kedua metode perhitungan PPN, dapat dilihat pada tabel.4.7

Tabel 4.7
Perbandingan Kedua Metode Perhitungan PPN Menggunakan Tarif 10% dan Tarif 2% ditinjau dari
Pendekatan Pembayaran PPN ke Kas Negara dan Prosedur Pencatatan Transaksi
(dalam Rupiah)

		Sebelum 1 Juni 2002						Setelah 1 Juni 2002					
No	Keterangan	Tarif PPN 10%			Tarif PPN 2 %			Tarif PPN 10%					
1	Transaksi Pembelian Barang Kena Pajak dari Pengusaha Kena Pajak	Dr Pembelian	2,140,139,043.00		Dr Pembelian	2,140,139,043.00		Dr Pembelian	2,140,139,043,00				
		Dr PPN Masukan	214,013,904.30		Dr PPN Masukan	214,039,904.30		Dr PPN Masukan	214,013,904,30				
		Cr Hutang		2,354,252,947.30	Cr Hutang		2,354,252,947.30	Cr Hutang		2,354,252,947,30			
2	Transaksi Pembelian Barang Kena Pajak dari Bukan Pengusaha Kena Pajak	Dr Pembelian	386,410,794.50		Dr Pembelian	386,410,794.50		Dr Pembelian	386,410,794,50				
		Cr Hutang		386,410,794.50	Cr Hutang		386,410,794.50	Cr Hutang		386,410,794,50			
3	Transaksi Penjualan Barang Dagang	Dr Kas	3,674,153,331.20		Dr Kas	3,674,153,331.20		Dr Kas	3,674,153,331,20				
		Cr Penjualan		3,340,139,392.00	Cr Penjualan		3,340,139,392.00	Cr Penjualan		3,340,139,392,00			
		Cr PPN Keluaran		334,013,939.20	Cr PPN Keluaran		334,013,939.20	Cr PPN Keluaran		334,013,939,20			
4	Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Terutang	Dr PPN Keluaran	334,013,939.20		Dr PPN Keluaran	66,802,786.84		Dr PPN Keluaran	334,013,939,20				
		Cr Kas		120,000,034.90	Cr Kas		66,802,786.84	Cr Kas		120,000,034,90			
		Cr PPN Masukan		214,013,904.30				Cr PPN Masukan		214,013,904,30			
5	Net-off PPN Keluaran dengan PPN Masukan dan membebankan sisanya ke Harga Pokok Penjualan				Dr PPN Keluaran	267,216,547.20							
					Cr PPN Masukan		214,013,904.30						
					Cr Harga Pokok Penjualan		26,202,642.90						

Dari tabel 4.8 dapat diketahui bahwa perbedaan antara kedua metode perhitungan PPN, tampak jelas pada jumlah no mor 4 dan 5. menurut perhitungan PPN yang menggunakan Nilai Lain sebagai DPP (Tarif 2%), dapat diketahui bahwa perusahaan harus membayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 99.713.211,14. sedangkan berdasarkan Perhitungan PPN menggunakan mekanisme Pengkreditan sebesar Rp. 284.552.151,43. Sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp 184.838.940,26. Dengan demikian ditinjau dari pendekatan pembayaran PPN Terutang yang harus disetor ke Kas Negara, metode perhitungan PPN dengan Tarif 2% akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan perhitungan PPN dengan Tarif 10%. Perbedaan besarnya PPN terutang yang disetor ke kas negara antara menggunakan Tarif 10% dan Tarif 2% tampak seperti pada tabel 4.8 :

Tabel 4.8.
Perbandingan Jumlah PPN Terutang antara Menggunakan
Metode Perhitungan PPN Tarif 10% dengan Tarif 2%

Metode Perhitungan PPN	PPN Terutang
Tarif 10%	Rp. 284.552.151,43
Tarif 2%	Rp. 99.713.211,14
Selisih PPN Terutang	Rp. 184.838.940,29

4.3.2.1.1 Perbandingan Kedua Metode ditinjau dari Pendekatan Laporan Laba Rugi

Sebelum menentukan metode perhitungan PPN yang paling menguntungkan perusahaan dapat melakukan perbandingan atas Tarif 10% dan Tarif 2% melalui Laporan Laba Rugi. Berikut ini akan disajikan pembahasan bagaimana dampak penerapan kedua metode perhitungan PPN pada Laporan Laba Rugi Perusahaan.

A. Menurut Perhitungan PPN yang Menggunakan Mekanisme Pengkreditan PPN Masukan dengan PPN Keluaran (Tarif 10%)

Pada metode perhitungan PPN menggunakan Tarif 10%, tidak akan dijumpai adanya penyesuaian atau *adjustment* terhadap unsur Harga Pokok Penjualan. Dalam hal ini Harga Pokok Penjualan perusahaan tidak akan mengalami penurunan. Sehingga laba kotor dan laba bersih sebelum pajak penghasilan tidak mengalami peningkatan. Dengan melihat Laporan Laba Rugi PT."X", dapat diketahui bahwa besarnya laba bersih sebelum Pajak Penghasilan adalah Rp.1.362.813.213,00 Untuk kepentingan perhitungan Pajak Penghasilan, maka laba bersih tersebut akan menjadi Penghasilan Kena Pajak. Sebagai Wajib Pajak Badan, PT."X" wajib menghitung dan menyetorkan sendiri Pajak Penghasilan kepada kas negara. Dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp.1.362.813.000,00 (setelah dibulatkan), maka Pajak Penghasilan terutang berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Pasal 17 adalah :

$$\begin{aligned}
 10\% \times \text{Rp. } 50.000.000,00 &= \text{Rp. } 5.000.000,00 \\
 15\% \times \text{Rp. } 50.000.000,00 &= \text{Rp. } 7.500.000,00 \\
 30\% \times \text{Rp. } 1.262.813.213,00 &= \underline{\text{Rp. } 378.843.963,90} \\
 &\text{Rp. } 391.343.963,90
 \end{aligned}$$

Jadi laba bersih setelah Pajak Penghasilan (PPh) adalah Rp. 971.469 249,10
 Laba bersih setelah Pajak Penghasilan ini diperoleh dengan cara mengurangi laba bersih sebelum Pajak Penghasilan dengan Pajak Penghasilan yang terutang. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{LababersihsebelumPajakPenghasilan} &= \text{Rp. } 1.362.813.213,00 \\
 \text{Pajak Penghasilan (PPh) Terutang} &= \underline{(\text{Rp. } 391.343.963,90)} \\
 \text{Laba bersih setelah Pajak Penghasilan} &= \text{Rp. } 971.469.249,10
 \end{aligned}$$

B. Menurut Perhitungan PPN yang menggunakan Nilai Lain sebagai dasar Pengenaan Pajak(Tarif2%)

Pada saat menerapkan metode perhitungan PPN dengan tarif 2%, akan tampak adanya *adinstment* sebagai pengurang unsur Harga Pakok Penjualan dalam Laporan Laba Rugi perusahaan. Sesuai dengan prosedur perhitungan PPN menggunakan Tanf

2%, dapat diperoleh besarnya *adjustment* yang dibutuhkan sebagai pengurang unsur Harga Pokok Penjualan adalah Rp. 184.838.940,26. Dengan adanya *adjustment*, Harga pokok Penjualan mengalami penurunan sebesar Rp. 184.838.940,26 akibat adanya net-off (selisih) antara jumlah PPN Keluaran dengan jumlah PPN Masukan sejumlah tersebut. Penurunan harga pokok penjualan (HPP) ini akan menyebabkan laba kotor dan laba bersih sebelum pajak penghasilan meningkat sejumlah Rp. 184.838.940,26. sehingga laba bersih sebelum PPh menjadi sebesar Rp. 1.547.652.158,76

Untuk kepentingan perhitungan PPh, maka laba bersih tersebut akan menjadi objek penghasilan yang dikenakan PPh. Dengan kata lain laba bersih sebelum PPh akan disebut sebagai Penghasilan Kena Pajak . dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 1.547.652.000,00 (setelah dibulatkan), maka PPh terutang berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Pasal 17 adalah :

$$\begin{aligned}
 10\% \times \text{Rp. } 50.000.000,00 &= \text{Rp. } 5.000.000,00 \\
 15\% \times \text{Rp. } 50.000.000,00 &= \text{Rp. } 7.500.000,00 \\
 30\% \times \text{Rp. } 1.447.652.646,80 &= \underline{\text{Rp. } 446.795.646,80} \\
 &\text{Rp. } 459.295.646,80
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa PPh Badan yang terutang pada akhir tahun 2002 yang menggunakan perhitungan Tarif 2% adalah sebesar Rp. 446.795.646,80 Dengan demikian laba bersih setelah PPh dapat dihitung dengan cara mengurangi laba bersih setelah PPh terutang. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Laba bersih sebelum Pajak Penghasilan} &= \text{Rp. } 1.547.652.158,76 \\
 \text{Pajak Penghasilan (PPh) Terutang} &= (\underline{\text{Rp. } 459.295.646,80}) \\
 \text{Laba bersih setelah Pajak Penghasilan} &= \text{Rp. } 1.100.856.511,04
 \end{aligned}$$

Berdasarkan pembahasan kedua metode perhitungan PPN diatas, maka dapat disajikan perbandingan Laporan Laba Rugi atas kedua metode perhitungan PPN sebagai berikut (lihat tabel 4.9).

Tabel 4.9
Perbandingan Laporan Laba Rugi antara Menggunakan Metode Perhitungan Tarif PPN 10% dengan Tarif PPN 2%
(Dalam Rupiah)

	Sebelum 1 Juni 2002		Sesudah 1 Juni 2002
	Tarif PPN 10%	Tarif PPN 2%	Tarif PPN 10%
Penjualan Retail	4.985.660.557,00	4.985.660.557,00	4.985.660.557,00
HARGA POKOK PENJUALAN			
Stok Awal	572.445.409,00	572.445.409,00	572.445.409,00
Pembelian Barang	2.526.549.838,50	2.526.549.838,50	2.526.549.838,50
Retur Pembelian	-----	-----	-----
	<u>2.526.549.838,50</u>	<u>2.526.549.838,50</u>	<u>2.526.549.838,50</u>
Stok Barang yang tersedia	3.098.995.244,50	3.098.995.244,50	3.098.995.244,50
Stok Akhir	(404.391.625,00)	(404.391.625,00)	(404.391.625,00)
	<u>2.694.603.618,50</u>	<u>2.694.603.618,50</u>	<u>2.694.603.618,50</u>
Laba Kotor	2.291.056.939,50	2.291.056.939,50	2.291.056.939,50
BIAYA USAHA			
BIAYA TOKO			
Biaya Gaji	385.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00
Biaya Sewa	<u>235.443.300,00</u>	<u>235.443.300,00</u>	<u>235.443.300,00</u>
	620.443.300,00	620.443.300,00	620.443.300,00
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI			
Biaya Listrik	85.365.439,00	85.365.439,00	85.365.439,00
Biaya Telephon/Fax	50.208.000,00	50.208.000,00	50.208.000,00
Biaya Retribusi Pasar/Sampah	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Biaya Rekening Air/PDAM	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
Biaya Ekspedisi Barang	40.850.000,00	40.850.000,00	40.850.000,00
Biaya Perlengkapan Kantor	15.365.800,00	15.365.800,00	15.365.800,00
Biaya Penyusutan	30.640.834,00	30.640.834,00	30.640.834,00
Biaya Perawatan & Pemeliharaan	30.837.600,00	30.837.600,00	30.837.600,00
Biaya Pengemasan	25.701.250,00	25.701.250,00	25.701.250,00
Biaya Bunga	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Biaya Lain-lain	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
	<u>307.800.423,00</u>	<u>307.800.423,00</u>	<u>307.800.423,00</u>
Total Biaya Usaha	<u>(928.243.723,00)</u>	<u>928.243.723,00</u>	<u>(928.243.723,00)</u>
Laba Bersih Sebelum Pajak Penghasilan	1.362.813.216,50	1.362.813.216,50	1.362.813.216,50
Pendapatan Lain-lain	0	<u>184.838.940,26</u>	0
	1.362.813.216,50	1.547.652.156,76	1.362.813.216,50
Pajak Penghasilan (Tarif PPh Pasal 17)	<u>(391.343.963,90)</u>	<u>(459.295.646,80)</u>	<u>(391.343.963,90)</u>
Laba Bersih Setelah Pajak Penghasilan	971.469.251,60	1.100.856.511,04	971.469.251,60

Dengan melihat perbandingan laporan laba rugi pada tabel 4.9, Laba Bersih Setelah Pajak Penghasilan menurut penghitungan PPN yang menggunakan Tarif 2 % adalah sejumlah Rp.1.100.856.511,04, sedangkan menurut Tarif 10% hanya berjumlah Rp.971.469.249,10. Dengan demikian terdapat perbedaan sebesar Rp. 129.387.262,06. Hal ini dapat mempengaruhi penilaian pembaca laporan keuangan mengenai kinerja keuangan Perusahaan karena kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba bersih akan dianggap lebih baik bila perhitungan PPN menggunakan Tarif 2% dibandingkan perhitungan PPN menggunakan Tarif 10%.

4.3.2.2 Perbandingan Kedua Metode ditinjau dari Pendekatan Pengeluaran Kas untuk Pembayaran Pajak

Sesuai dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2000 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2000, PT."X" wajib melakukan pembayaran atas 2 macam pajak, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Dengan demikian selama tahun 2002, PT."X" dapat menghitung besarnya kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak secara keseluruhan. Perbedaan jumlah pajak yang harus dibayar Perusahaan akibat perbedaan kedua metode perhitungan PPN akan tampak pada tabel 4.10.

TABEL 4.10
Perbandingan Jumlah Pajak yang Harus Dibayar atas Kedua
Metode Perhitungan PPN Menggunakan Tarif 10% dan Tarif 2%
(dalam Rupiah)

	Tarif Umum 10%	Nilai Lain sebagai DPP (Tarif 2%)	Perbedaan	% Perbedaan
	(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	
Kas Keluar untuk Pembayaran Pajak				
PPN Terutang	284.552.151,43	99.713.211,14	184.838.940,29	80%
Taksiran PPh	391.343.963,90	459.295.646,80	-67.951.682,90	60%
Jumlah Pajak	675.895.115,33	559.008.857,94	116.862.258,61	30%

Melalui tabel 4.10, dapat diketahui bahwa bila perusahaan menerapkan Perhitungan PPN menggunakan nilai lain sebagai Dasar pengenaan Pajak (Tarif 2%), Perusahaan harus membayar pajak selama tahun berjalan sebesar Rp. 559.008.857,94. sedangkan Perhitungan PPN menggunakan mekanisme Pengkreditan PPN Masukan dengan PPN Keluaran (Tarif 10%), Perusahaan harus membayar pajak sebesar Rp. 675.896.115,33. Dengan demikian ditinjau dari pendekatan pengeluaran kas dalam rangka pembayaran pajak, perhitungan PPN menggunakan Tarif 2% akan lebih menguntungkan dibandingkan menggunakan Tarif 10% karena terdapat penghematan pajak sebesar Rp. 116.887.258,61.

4.3.3 Perbandingan antara Metode Perhitungan PPN Menggunakan Tarif 10% dengan Tarif 2% pada Titik Ekuilibrium

Sebelum sampai pada kesimpulan akhir mengenai evaluasi terhadap alternatif perhitungan PPN yang paling menguntungkan bagi PT."X", maka penulis akan menyajikan perhitungan matematis untuk mencari Titik Ekuilibrium. Titik Ekuilibrium yang dimaksud oleh penulis adalah suatu titik dimana tidak ada yang lebih menguntungkan atau lebih merugikan dalam hal memilih metode Tarif 10% atau Tarif 2% pada perusahaan ritel. Hal ini karena jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak selama tahun berjalan (tahun 2002) dan dampaknya terhadap laporan keuangan akan sama besar.

Titik Ekuilibrium akan diperoleh dengan cara membuat persamaan matematis antara prosedur perhitungan PPN terutang menggunakan Tarif 10% dengan Tarif 2%. Angka pembelian dan penjualan yang digunakan untuk menghitung Titik Ekuilibrium merupakan 2 (dua) variabel yang tetap. Variabel "X" dipakai untuk menggantikan angka pembelian, sedangkan variabel "Y" akan menggantikan angka penjualan

Besarnya angka pembelian yang digunakan untuk menghitung Titik Ekuilibrium adalah sama dengan total pembelian dari PKP yang benar-benar terjadi dalam perusahaan selama tahun 2002, yaitu sejumlah Rp. 2.526.549.838,50. Hal ini karena PPN Masukan hanya akan dibayar oleh perusahaan pada transaksi pembelian yang berasal dari PKP.

Saat angka pembelian sebesar Rp. 2.140.134.043,00 menggantikan variabel "X", secara tidak langsung akan diperoleh besarnya nilai variabel "Y". Dengan demikian besarnya angka penjualan dapat diperoleh dengan cara mensubstitusikan variabel "X" dengan angka pembelian sebesar Rp. 2.140.139.043,00. untuk semakin memperjelas, dapat dilakukan perhitungan Titik Ekuilibrium sebagai berikut:

Rumus Perhitungan PPN Terutang dengan Tarif 10%

= PPN Keluaran - PPN Masukan

= (10% x angka penjualan) - (10% x angka pembelian)

= 10% x (angka penjualan - angka pembelian)

Rumus Perhitungan PPN terutang dengan Tarif 2 %

= 2 % x penyerahan Barang Kena Pajak

= 2 % x angka pembelian

PPN terutang dengan Tarif 10% = PPN Terutang dengan Tarif 2%

$$\begin{array}{rcl}
 10\% \times (\text{angka penjualan} - \text{angka pembelian}) & = & 2\% \times \text{angka penjualan} \\
 10\% \times (Y - X) & = & 2\% \times Y \\
 10\% - 10\%X & = & 2\% Y \\
 10\% Y - 2\% Y & = & 10\% X \\
 8\% Y & = & 10\% \times \text{Rp. 2.526.549.838,50} \\
 8\% Y & = & \text{Rp. 25.654.083,85} \\
 Y & = & \text{Rp. 320.676.048,13}
 \end{array}$$

Dari perhitungan diatas dapat dijelaskan bahwa nilai variabel "Y" adalah sama dengan besarnya angka penjualan. yaitu senilai Rp. 320.676.048,13 Melalui perhitungan tersebut, juga diketahui bahwa Titik Ekuilibrium baru akan tercapai bila pada pembelian yang berasal dan PKP sebesar Rp. 2.526.549.838,50, PT."X" mampu menjual barang dagangannya senilai Rp. 320.676.048,13

4.3.3.1 Penggunaan Titik Ekuilibrium Pada Kedua Metode Perhitungan PPN di tinjau dari Pendekatan Pembayaran PPN Terutang ke Kas Negara.

Dengan tercapainya Titik Ekuilibrium, maka langkah selanjutnya adalah melihat bagaimana penggunaan Titik Ekuilibrium tersebut pada kedua metode perhitungan PPN yang ditinjau dari pendekatan PPN terutang. Melalui Titik Ekuilibrium, dapat dihitung besarnya PPN terutang yang harus disetor ke kas negara. Untuk kepentingan tersebut, maka penggunaan Titik Ekuilibrium dapat diterapkan pada prosedur pencatatan transaksi (jurnal entry) dengan menggunakan Tarif 10% dan Tarif 2%

A. Prosedur Pencatatan Transaksi (Jurnal Entry) Berdasarkan Perhitungan PPN yang Menggunakan Mekanisme Pengkreditan PPN Masukan dengan PPN Keluaran (Tarif 10%)

Dengan tercapainya Titik Ekuilibrium pada pembelian dan penjualan senilai Rp. 2.526.549.838,50 dan Rp 320.676.048,13, maka perhitungan besarnya PPN terutang yang harus ditanggung oleh PT."X" adalah :

PPN Keluaran :

Penjualan Barang Kena Pajak

$$= 10\% \times \text{Rp. } 320.676.048,13 = \text{Rp. } 32.067.604,81$$

PPN Masukan :

Pembelian yang berasal dari PKP

$$= 10\% \times \text{Rp. } 2.526.549.838,50 = \underline{(\text{Rp. } 252.654.983,85)}$$

$$\text{PPN yang masih harus dibayar} = \text{Rp. } 220.587.379,04$$

Dari perhitungan diatas terlihat bahwa jumlah PPN yang masih harus dibayar oleh PT."X" adalah sebesar Rp. 220.587.379,04. Dengan menggunakan Tarif Umum 10%, jurnal yang dapat dibuat untuk mencatat transaksi yang terjadi di Perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Transaksi pembelian Barang Kena Pajak dari PKP

Pembelian	Rp. 2.526.549.838,50
-----------	----------------------

PPN Masukan	Rp. 252.654.983,85
-------------	--------------------

Hutang	Rp. 2.779.204.822,35
--------	----------------------

b. Transaksi penjualan Barang Kena Pajak

Piutang	Rp. 796.818.771,02
---------	--------------------

Penjualan	Rp. 320.676.048,13
-----------	--------------------

PPN Keluaran	Rp. 476.142.722,89
--------------	--------------------

c. Transaksi Pembayaran PPN terutang

PPN Keluaran	Rp. 476.142.722,89
--------------	--------------------

Kas	Rp. 223.487.739,04
-----	--------------------

PPN Masukan	Rp. 256.654.983,85
-------------	--------------------

B. Prosedur Pencatatan Transaksi (jurnal Entry) Berdasarkan Perhitungan PPN yang Menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (Tarif 2%)

Melalui Titik Ekuilibrium yang diterapkan pada metode perhitungan PPN dengan Tarif 2%, maka terdapat beberapa jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi yang terjadi di perusahaan, yaitu :

a. Transaksi pembelian Barang Kena Pajak dari PKP

Jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat transaksi pembelian yang berasal dari PKP tidak menimbulkan perbedaan, baik yang menggunakan tarif 10% maupun 2%. PPN Masukan yang dibayar tetap menghasilkan jumlah sebesar 10 % dari pembelian yang dilakukan. yaitu :

$$10 \% \times \text{Rp. } 2.526.549.838,50 = \text{Rp. } 252.654.983,85$$

Jurnal yang harus dibuat atas transaksi tersebut adalah :

Pembelian	Rp. 2.526.654.983,50
-----------	----------------------

PPN Masukan	Rp. 252.654.983,85
-------------	--------------------

Hutang	Rp. 2.779.204.819,35
--------	----------------------

b. Transaksi penjualan Barang Kena Pajak

Sesuai dengan Surat Edaran No. 06/Pj.52/1995, PPN yang dipungut ke konsumen saat terjadinya penjualan barang adalah sebesar 10%. Sesuai dengan Titik Ekuilibrium, maka trilai penjualan yang digunakan dalam perhitungan adalah sebesar Rp. 320.676.048,30. Perhitungan PPN yang di pungut ke konsumen adalah sebagai berikut:

Penjualan Barang	Rp. 320.676.048,30
------------------	--------------------

PPN Keluaran :

10 % x Rp. 320.676.048,30	Rp. 32.067.604,80
---------------------------	-------------------

Jumal atas transaksi diatas adalah :

Piutang	Rp. 352.743.653 ,10
---------	---------------------

Penjualan	Rp. 320.676.048,30
-----------	--------------------

PPN Keluaran	Rp. 32.067.604,80
--------------	-------------------

c. Transaksi pembayaran PPN Terutang

Bila perusahaan menerapkan metode perhitungan PPN dengan tarif 2%, maka PPN terutang yang harus disetor ke kas negara adalah sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dalam hal ini, yang menjadi DPP untuk menghitung PPN terutang adalah harga jual barang dagangan. Dengan tetap menggunakan Titik Ekuilibrium dengan nilai penjualan sebesar Rp, 320.676.048,30 , dapat diperoleh perhitungan PPN terutang sebagai berikut:

$$= 2 \% \times \text{DPP}$$

$$= 2 \% \times \text{Rp. 320.676.048,30}$$

$$= \text{Rp. 6.413.520,97}$$

Jumal dari transaksi diatas adalah :

PPN Keluaran	Rp. 6.413.520,97
--------------	------------------

Kas	Rp. 6.413.520,97
-----	------------------

d. Jurnal untuk mencatat Net-off PPN Keluaran dengan PPN Masukan

Saat perusahaan menerapkan metode perhitungan PPN dengan Tarif 2%, perusahaan harus membayar PPN terutang ke kas negara sebesar 2% dari penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), Namun perusahaan tetap dapat memungut PPN sebesar 10% dari total penyerahan BKP kepada konsumen. Dengan demikian terdapat selisih PPN Keluaran antara yang diterima dari konsumen dengan PPN yang dibayar ke Kas Negara sebesar 8 % (delapan persen). Perhitungannya adalah sebagai berikut:

* PPN Keluaran yang dipungut:

$$= 10 \% \times \text{Rp. } 320.676.048,13 = \text{Rp. } 32.067.604,81$$

* PPN Keluaran yang harus dibayar ke Kas Negara:

$$= 2 \% \times \text{Rp. } 320.676.048,13 = (\text{Rp. } 6.413.520,97)$$

* Selisih PPN Keluaran:

$$= 8 \% \times \text{Rp. } 320.676.048,13 = \text{Rp. } 25.654.083,85$$

Berdasarkan ketentuan mengenai Mekanisme Pengkreditan PPN dalam Bab 1 Pasal 3 ayat (1) PP No. 138 Tahun 2000 Tanggal 21 Desember 2000 mengenai Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, maka selisih PPN sebesar 8% tersebut akan dibebankan sebagai pengurang atau penambah unsur Harga Pokok Penjualan. Dengan demikian selisih PPN Keluaran sebesar Rp 25.654.083,85 itu akan dikurangkan dengan PPN Masukan aktual (10%). Perhitungannya adalah sebagai berikut:

Selisih PPN Keluaran	Rp. 25.654.083,85
----------------------	-------------------

PPN Masukan aktual:

* untuk pembelian dari PKP	<u>(Rp. 25.654.083,85)</u>
----------------------------	----------------------------

Harga Pokok Penjualan	= 0 =
-----------------------	-------

Jumlah yang dibuat untuk mencatat net-off PPN Keluaran dengan PPN Masukan adalah sebagai berikut:

PPN Keluaran	Rp. 25.654.083,85	
PPN Masukan		Rp. 25.654.083,85
Harga Pokok Penjualan		Rp. 0,00

Untuk memperjelas penggunaan Titik Ekuilibrium pada prosedur pencatatan transaksi dengan menggunakan Tarif 10% dan Tarif 2% dapat dilihat pada tabel 4.11.

Tabel 4.11
Perbandingan Kedua Metode Perhitungan PPN Menggunakan Tarif 10% dan Tarif 2% ditinjau dari Pendekatan
Pembayaran PPN Terutang ke Kas Negara dan Prosedur Pencatatan transaksi pada Titik Ekuilibrium
(dalam Rupiah)

Keterangan		Tarif 10%			Tarif 2 %		
Transaksi Pembelian	Dr	Pembelian	2,140,139,403.00		Dr	Pembelian	2,140,139,403.00
Barang Kena Pajak dari	Cr	PPN Masukan	214,013,940.30		Dr	PPN Masukan	214,413,940.30
Pengusaha Kena Pajak	Cr	Hutang		2,354,153,343.30	Cr	Hutang	2,354,153,343.30
Transaksi Penjualan	Dr	Kas	2,942,677,433.30		Dr	Kas	2,942,677,433.30
Barang Dagang	Cr	Penjualan		2,675,161,303.00	Cr	Penjualan	2,675,161,303.00
	Cr	PPN Masukan		267,516,130.30	Cr	PPN Keluaran	267,516,130.30
Pembayaran Pajak Pertambahan	Dr	PPN Keluaran	267,517,166.36		Dr	PPN Keluaran	53,503,226.06
Nilai Terutang	Cr	Kas		53,503,226.06	Cr	Kas	53,503,226.06
	Cr	PPN Masukan		214,013,940.30			
Net-off PPN Keluaran dengan					Dr	PPN Keluaran	214,013,940.30
PPN Masukan dan Membebankan					Cr	PPN Masukan	214,013,940.30
sisanya ke Harga Pokok Penjualan					Cr	Harga Pokok Penjualan	0.00

Melalui jurnal no. 3 pada tabel 4.11 dapat diketahui bahwa ternyata pada titik Ekuilibrium, perusahaan mengeluarkan jumlah jasa yang sama besarnya antara menggunakan tarif 10% dan Tarif 2%. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya PPN terutang yang harus dibayar PT."X" bernilai sama, yaitu sejumlah Rp. 6.413.520,97. Dengan demikian penggunaan Tarif 10% dan Tarif 2% oleh PT."X" akan memberikan keuntungan yang sama. Jumlah PPN terutang yang harus disetor PT."X" menurut Tarif 10% dan Tarif 2% pada kondisi tercapainya Titik Ekuilibrium tampak pada tabel 4.13 berikut ini:

Tabel 4.12.

Perbandingan Jumlah PPN Terutang antara Menggunakan Metode Perhitungan PPN Tarif 10% dengan Tarif 2% pada Titik Ekuilibrium

Metode Perhitungan PPN	) PPN Terutang
Tarif 10%	Rp. 6,413,520.97
Tarif 2%	Rp. 6,413,520.97
Selisih PPN Terutang	0.00

4.3.3.2 Penggunaan Titik Ekuilibrium pada Kedua Metode Perhitungan PPN ditinjau dari Pendekatan Laporan Laba Rugi

Penggunaan Titik Ekuilibrium juga tampak pada Laporan Laba Rugi berdasarkan kedua metode perhitungan PPN yang diterapkan. Untuk mengetahui penggunaan titik ekuilibrium tersebut, terlebih dahulu ditentukan besarnya laba bersih pada titik ekuilibrium yang dicapai oleh PT."X" berdasarkan pembelian yang berasal dari PKP. Berikut ini adalah data mengenai stok barang awal dan akhir yang didasarkan pada pembelian dari PKP (Tabel 4.13 dan Tabel 4.14).

Tabel 4.13.
Data Stok Barang Awal Berdasarkan Pembelian dari PKP
Selama Tahun 2002 (dalam Rupiah)

Kelompok Pembelian	Stok Barang Awal
Alat-alat Tulis Kantor	435,222,273.70
Foto Copy	55,543,178.22
Cetakan	20,754,655.25
Alat-alat Percetakan	60,925,301.85
Total	572,445,409.00

Tabel 4.14.
Data Stok Barang Akhir Berdasarkan Pembelian dari PKP
Selama Tahun 2002 (dalam Rupiah)

Kelompok Penjualan	Stok Barang Akhir
Alat-alat Tulis Kantor	326,119,382.80
Foto Copy	30,645,735.05
Cetakan	12,200,850.25
Alat-alat Percetakan	35,425,657.90
Total	404,391,626.00

Sumber : dokumen perusahaan

Sesuai dengan tabel 4.13 dan tabel 4.14 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah stok barang awal untuk pembelian dari PKP adalah sebesar Rp. 572.445.409,00. Sedangkan jumlah stok barang akhir untuk pembelian dari PKP adalah Rp. 404.391.626,00. Berdasarkan data tersebut, dapat diperoleh laba bersih sebelum Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 168.053.783,00 Untuk kepentingan perhitungan Pajak Penghasilan, maka laba bersih tersebut akan menjadi Penghasilan Kena Pajak. Sebagai Wajib Pajak Badan, PT."X" wajib menghitung dan menyetorkan sendiri Pajak Penghasilan kepada kas negara. Dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar

Rp. 168.053.000,00 (setelah dibulatkan), maka Pajak Penghasilan terutang berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Pasal 17 adalah :

$$\begin{aligned}
 10 \% \times \text{Rp. } 50.000.000,00 &= \text{Rp. } 5.000.000,00 \\
 15 \% \times \text{Rp. } 50.000.000,00 &= \text{Rp. } 7.500.000,00 \\
 30 \% \times \text{Rp. } 68.053.000,00 &= \underline{\text{Rp. } 20.415.900,00} \\
 &\text{Rp. } 32.915.900,00
 \end{aligned}$$

Jadi laba bersih setelah Pajak Penghasilan (PPh) adalah Rp. 135.137.883,00. Laba bersih setelah Pajak Penghasilan ini diperoleh dengan cara mengurangi laba bersih sebelum Pajak Penghasilan dengan Pajak Penghasilan yang terutang. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Laba bersih sebelum Pajak Penghasilan} &= \text{Rp. } 168.053.783,00 \\
 \text{Pajak Penghasilan (PPh) Terutang} &= \underline{(\text{Rp. } 32.915.900,00)} \\
 \text{Laba bersih setelah Pajak Penghasilan} &= \text{Rp. } 135.137.883,00
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka laporan Laba Rugi tahun 2002 pada kondisi tercapainya Titik Ekuilibrium atas kedua metode perhitungan PPN.